

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perubahan lanskap ekonomi pedesaan dalam dua dekade terakhir menunjukkan pergeseran signifikan dari ketergantungan pada sektor agraris menuju diversifikasi ekonomi berbasis jasa, khususnya pariwisata berkelanjutan. Pergeseran ini tidak hanya mencerminkan adaptasi terhadap dinamika pasar global, tetapi juga menandai transformasi struktural yang memengaruhi relasi sosial, pola penghidupan, serta tata kelola sumber daya di tingkat lokal (Jeyacheya & Hampton, 2020; Nugroho, Negara, & Yuniar, 2018).

Dalam praktiknya, pariwisata berkelanjutan menuntut integrasi menyeluruh antara dimensi ekonomi, sosial, dan ekologi. Tanpa integrasi tersebut, pembangunan pariwisata berisiko terjebak dalam apa yang disebut sebagai green rhetoric, yakni penggunaan narasi keberlanjutan yang tidak diikuti oleh praktik pengelolaan yang berimbang dan berjangka panjang (Naumov, 2022).

Pada tataran global, perkembangan pariwisata tidak dapat dilepaskan dari ekspansi pariwisata massal, yang ditandai oleh mobilitas wisatawan berskala besar, homogenisasi paket wisata, serta konsentrasi kunjungan dalam periode tertentu (Volkmer & Pedrozo, 2019). Model ini terbukti memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja, khususnya di negara berkembang (Landini, 2021). Pemerintah Indonesia pun menjadikan sektor pariwisata sebagai salah satu motor pembangunan nasional melalui kebijakan strategis dan insentif ekonomi (Yunita & Andina, 2018).

Namun, di balik manfaat tersebut, pariwisata massal juga memunculkan kerentanan sosial-ekologis baru. Globalisasi mobilitas manusia, kemajuan teknologi transportasi dan informasi, serta kemudahan akses finansial menjadikan perjalanan wisata semakin terjangkau dan masif (Kovalev et al.,

2024). Digitalisasi dan strategi pemasaran berbasis data menciptakan destinasi wisata yang “viral”, tetapi rentan terhadap tekanan ekologis dan sosial.

Sejumlah studi menunjukkan bahwa ekspansi pariwisata massal berkontribusi pada degradasi lingkungan, konversi lahan, peningkatan limbah, serta tergerusnya ruang hidup masyarakat lokal. Penelitian di Danau Balaton, Hongaria, misalnya, mengungkap perubahan signifikan pada pola penggunaan lahan akibat pertumbuhan pariwisata yang tidak terkendali (Petrovszki et al., 2024). Kerentanan ini semakin terlihat pada masa pandemi COVID-19, ketika tingginya mobilitas wisatawan mempercepat transmisi penyakit lintas wilayah dan negara (Alim et al., 2023; Sacramento, 2023).

Merespons berbagai dampak negatif pariwisata massal, ekowisata berkembang sebagai paradigma alternatif yang menekankan konservasi lingkungan, pelibatan komunitas lokal, serta pendidikan ekologis sebagai fondasi pengelolaan destinasi (Fandeli, 2002). Ekowisata tidak sekadar mempromosikan wisata berbasis alam, tetapi juga menempatkan masyarakat lokal sebagai aktor utama dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan pariwisata.

Dalam beberapa tahun terakhir, wilayah Sumatera Barat menunjukkan peningkatan signifikan dalam pengembangan potensi wisata lokal berbasis ekowisata hingga ke tingkat kenagarian. Paradigma ini muncul sebagai respons terhadap kekhawatiran atas dampak destruktif pariwisata massal terhadap lingkungan dan nilai sosial budaya. Ekowisata dipandang sebagai strategi pembangunan yang lebih selaras dengan karakter ekologis dan kultural masyarakat Minangkabau.

Dalam kerangka kebijakan nasional, pengembangan pariwisata berbasis masyarakat dilaksanakan melalui Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis). Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata menegaskan bahwa Pokdarwis merupakan entitas sosial yang tumbuh dari inisiatif warga dan berperan penting dalam menumbuhkan kesadaran serta partisipasi masyarakat dalam pembangunan pariwisata (Burhan & Mardiah, 2020; Resdiana et al., 2021). Hal ini diperkuat oleh Peraturan Menteri Pariwisata

Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 yang menempatkan Pokdarwis sebagai penggerak utama pelestarian budaya, lingkungan, dan pelayanan wisata.

Namun, efektivitas peran Pokdarwis sangat ditentukan oleh kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia yang dimilikinya. Kapasitas tidak hanya dipahami sebagai keterampilan teknis, tetapi sebagai kemampuan sistemik organisasi untuk berkomitmen, menjalankan fungsi, membangun relasi, serta beradaptasi terhadap perubahan (Morgan, 1998). Tanpa kapasitas tersebut, Pokdarwis berisiko menjadi aktor simbolik yang bergantung pada intervensi eksternal.

Dengan demikian, konsep pengembangan ekowisata penting bagi Pokdarwis dalam memahami bagaimana Agama Islam berbicara perspektif bukan hanya sekadar pariwisata berbasis alam, tetapi juga merupakan amanah dan ibadah. Adapun etika pelestarian lingkungan (Ekologis) yang ideal, Sebagaimana Allah SWT berfirman:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ٥٦ (الأعراف/٧: ٥٦)

Terjemahan:

56. “Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik” (Al-A'raf/7:56).

Dalam penafsirannya, Ibnu Katsir menjelaskan bahwa ayat ini merupakan larangan tegas terhadap segala bentuk perusakan setelah Allah menciptakan tatanan kehidupan yang seimbang. Kerusakan tersebut mencakup kezaliman sosial, kemaksiatan moral, serta eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan yang merusak keberlanjutan kehidupan (Ibnu Katsir, 2000).

Dalam konteks ekowisata, ayat ini menegaskan bahwa praktik pariwisata yang merusak lingkungan bertentangan dengan prinsip Islam. Sebaliknya, pengelolaan wisata berbasis konservasi, partisipasi masyarakat, dan keberlanjutan ekologis merupakan perwujudan nyata dari tanggung jawab manusia sebagai khalifah di bumi. Oleh karena itu, penguatan kapasitas

Pokdarwis tidak hanya bersifat teknis dan kelembagaan, tetapi juga harus menyentuh dimensi etika, spiritual, dan kesadaran ekologis religius.

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa kelemahan kapasitas kelembagaan Pokdarwis merupakan hambatan mendasar dalam pengembangan ekowisata berbasis masyarakat. Dewi (2020) serta Pratama dan Barokah (2022) menemukan bahwa banyak Pokdarwis belum mampu mengelola potensi wisata secara mandiri akibat ketiadaan perencanaan strategis jangka panjang dan tingginya ketergantungan pada pihak eksternal.

Selain itu, rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan juga menjadi persoalan krusial. Studi Ramanda et al. (2020) dan Resa (2022) menunjukkan bahwa dominasi aktor eksternal dan lemahnya mekanisme demokratis menyebabkan pengelolaan ekowisata tidak merefleksikan aspirasi serta nilai-nilai lokal. Keterbatasan kaderisasi, minimnya pelatihan berkelanjutan, dan desain kelembagaan yang lemah turut berdampak pada rendahnya inovasi sosial berbasis komunitas (Febrina, 2018; Putra, 2013).

Lebih jauh, pendekatan kelembagaan Pokdarwis sering bersifat normatif dan kurang adaptif terhadap konteks sosial-budaya setempat, sehingga memperlebar kesenjangan antara idealitas konsep ekowisata dan kapasitas lokal yang tersedia (Pratama & Barokah, 2022).

Meskipun berbagai studi telah mengidentifikasi kelemahan kapasitas kelembagaan Pokdarwis, sebagian besar penelitian masih berfokus pada aspek teknis dan administratif, serta belum mengintegrasikan pendekatan partisipatif transformatif yang berbasis nilai lokal dan etika keagamaan. Selain itu, kajian empiris yang menempatkan Pokdarwis sebagai subjek reflektif dalam konteks nagari Minangkabau masih sangat terbatas.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan mengisi kekosongan tersebut dengan mengkaji penguatan kapasitas Pokdarwis dalam pengembangan ekowisata melalui pendekatan *Community-Based Research* (CBR) yang terintegrasi dengan nilai ekologis, sosial-budaya, dan etika Islam.

Nagari Batu Bajanjang terletak di Kecamatan Lembang Jaya, Kabupaten Solok, Sumatera Barat, pada ketinggian sekitar 1.500 meter di atas permukaan

laut di lereng Gunung Talang. Wilayah seluas 10,72 km² ini terdiri atas delapan jorong dan didominasi topografi pegunungan serta perbukitan lindung yang memiliki potensi besar bagi pengembangan ekowisata alam (BPS Kabupaten Solok, 2024).

Secara sosial ekonomi, sekitar 65% angkatan kerja masih bergantung pada sektor primer, sementara sektor perdagangan dan jasa baru menyerap sekitar 20% tenaga kerja. Struktur sosial yang relatif homogen dengan nilai gotong royong yang kuat menjadikan nagari ini memiliki modal sosial yang potensial untuk pengembangan pariwisata berbasis komunitas.

Pokdarwis Tabek Hilang Lanyek secara resmi dibentuk pada 12 Januari 2022 berdasarkan SK Wali Nagari Batu Bajanjang Nomor 36 Tahun 2022. Meskipun menunjukkan inisiatif lokal, hasil observasi awal pada Oktober 2024 menunjukkan bahwa kapasitas kelembagaan Pokdarwis masih belum optimal, baik dari aspek visi, pemahaman konseptual ekowisata, inovasi pengelolaan, maupun perencanaan strategis berbasis data dan kolaborasi lintas sektor.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini menegaskan bahwa penguatan kapasitas Pokdarwis di Nagari Batu Bajanjang bukan sekadar kebutuhan teknis, melainkan proses transformasi kelembagaan dan sosial menuju tata kelola ekowisata yang berkelanjutan, partisipatif, dan kontekstual. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi teoretis dan praktis bagi pengembangan ekowisata berbasis komunitas, khususnya dalam konteks nagari Minangkabau yang sarat nilai ekologis dan religius.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini menegaskan bahwa penguatan kapasitas Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) di Nagari Batu Bajanjang tidak dapat dipahami semata-mata sebagai kebutuhan teknis, melainkan sebagai proses transformasi kelembagaan dan sosial menuju tata kelola ekowisata yang berkelanjutan, partisipatif, dan kontekstual. Melalui pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan kajian ekowisata berbasis komunitas serta kontribusi praktis

bagi penguatan kelembagaan Pokdarwis, khususnya dalam konteks nagari Minangkabau yang sarat dengan nilai ekologis dan religius.

Merujuk pada kondisi eksisting subjek dampingan, penelitian ini menetapkan beberapa kondisi ideal yang diharapkan sebagai arah transformasi penguatan kapasitas Pokdarwis. Pertama, terwujudnya partisipasi aktif dan konsisten anggota Pokdarwis dalam setiap tahapan pengelolaan ekowisata. Partisipasi ini diharapkan tercermin melalui keterlibatan berkelanjutan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan ekowisata, yang didukung oleh mekanisme diskusi internal yang adaptif serta tumbuhnya inisiatif mandiri tanpa ketergantungan pada dorongan eksternal.

Kedua, meningkatnya pemahaman dan literasi anggota Pokdarwis mengenai prinsip ekowisata berkelanjutan. Peningkatan literasi ini mencakup kesadaran ekologis, kemampuan belajar mandiri, serta pemahaman konseptual mengenai pengelolaan destinasi wisata berbasis konservasi, sehingga anggota mampu menjaga kelestarian kawasan Tabek Hilang Lanyek sekaligus mengembangkan kapasitas pengelolaan destinasi secara internal.

Ketiga, terbangunnya integrasi yang kuat antara partisipasi dan pengetahuan dalam proses perencanaan ekowisata. Integrasi ini diharapkan menghasilkan fondasi perencanaan yang partisipatif dan berbasis kapasitas lokal, di mana keterlibatan aktif anggota selaras dengan pemahaman konseptual yang memadai, sehingga strategi pengembangan ekowisata yang dirumuskan bersifat realistis, berkelanjutan, dan kontekstual dengan kebutuhan serta potensi nagari.

1.2 Fokus Dampingan

Berdasarkan uraian di atas maka penulis berfokus penelitian ini pada penguatan kapasitas Pokdarwis Dalam pengembangan ekowisata di Nagari Nagari Batu Bajanjang Kecamatan Lembang Jaya Kabupaten Solok melalui pendekatan CBR (*Community-Based Research*). *Community* disini yang maksud adalah Anggota Pokdarwis menjadi aktor utama, berpartisipasi aktif dan mandiri. Sedangkan *Based*: Kegiatan berbasis kebutuhan, kapasitas, dan

potensi lokal. *Management*: Pengelolaan sumber daya alam dan sosial dilakukan partisipatif dan berkelanjutan.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Studi ini difokuskan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari subjek dampingan berikut:

- 1.3.1 Bagaimana karakteristik historis, geografis, demografis, dan ekologis Nagari Batu Bajanjang sebagai konteks pengembangan ekowisata berbasis komunitas?
- 1.3.2 Bagaimana melakukan proses pemberdayaan dalam Penguatan Kapasitas Pokdawarwis terkait Pengembangan Ekowista di Nagari Batu Bajanjang?
- 1.3.3 Bagaimana melakukan terminasi dan evaluasi untuk mempersiapkan Pokdarwis di Nagari Batu Bajanjang, agar tetap mandiri setelah proses Penguatan Kapasitas selesai?

1.4 Tujuan Dampingan

Untuk menjadikan Kelompok Sadar Wisata sebagai agen perubahan dalam proses pengembangan ekowisata berkelanjutan di Nagari Batu Bajanjang.

- 1.4.1 Membangun pemahaman bersama Pokdarwis dan pemangku kepentingan nagari mengenai karakteristik historis, geografis, demografis, dan ekologis Nagari Batu Bajanjang sebagai landasan kontekstual dalam merumuskan strategi pengembangan ekowisata berbasis komunitas yang selaras dengan potensi lokal, struktur sosial, dan daya dukung lingkungan.
- 1.4.2 Mengimplementasikan dan menganalisis proses penguatan kapasitas Pokdarwis Nagari Batu Bajanjang dalam pengembangan ekowisata berbasis komunitas melalui tahapan partisipatif yakni pendekatan CBR untuk membangun kapasitas reflektif, perencanaan kolektif, dan kemandirian kelembagaan.
- 1.4.3 Mempersiapkan pokdarwis Nagari Batu Bajanjang agar mencapai kemandirian kelembagaan dan operasional dalam pengembangan

ekowisata berbasis komunitas melalui mekanisme terminasi penguatan kapasitas yang terencana, evaluasi berbasis proses, serta penguatan sistem monitoring internal yang dikelola secara kolektif oleh komunitas.

1.5 Analisis Strategi Dampingan

Bertolak dari kompleksitas permasalahan yang dihadapi Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) di Nagari Batu Bajanjang yang meliputi lemahnya kapasitas kelembagaan, rendahnya literasi ekowisata berkelanjutan, serta belum terintegrasinya partisipasi dan pengetahuan dalam perencanaan maka diperlukan suatu strategi pendampingan yang tidak bersifat parsial dan teknokratis, tetapi mampu mengaitkan masalah, tujuan, proses, dan perubahan yang diharapkan secara sistematis. Dalam konteks tersebut, penelitian ini menggunakan *Logical Framework Approach* (LFA) sebagai pendekatan strategis dalam perancangan dan analisis pendampingan.

LFA merupakan alat perencanaan dan manajemen program yang dirancang untuk menyusun kerangka logis hubungan sebab–akibat antara masalah, tujuan, hasil, aktivitas, serta asumsi yang memengaruhi keberhasilan suatu intervensi (Kumar & Green, 2020). LFA tidak hanya berfungsi sebagai dokumen perencanaan, tetapi juga sebagai instrumen analitis yang memastikan bahwa suatu program berjalan terarah, koheren, dan mudah dievaluasi. Melalui struktur logika yang jelas, LFA membantu menjembatani kesenjangan antara kondisi eksisting dan kondisi ideal yang diharapkan.

Pemilihan LFA dalam penelitian ini relevan dengan latar belakang penelitian yang menekankan perlunya transformasi kelembagaan Pokdarwis, bukan sekadar peningkatan keterampilan teknis. LFA memungkinkan peneliti dan komunitas dampingan untuk mengidentifikasi akar masalah secara partisipatif melalui *problem tree*, memetakan kepentingan dan peran para pemangku kepentingan, serta merumuskan tujuan dan strategi intervensi yang realistis dan kontekstual (Mustaghfiroh et al., 2020; Subagiyo et al., 2020; Zulkarnain et al., 2022).

Dalam konteks pendampingan Pokdarwis, LFA berfungsi sebagai kerangka kerja yang menata proses penguatan kapasitas secara bertahap dan terukur. Perbedaan yang jelas antara *output* (hasil langsung dari aktivitas pendampingan, seperti peningkatan pengetahuan, terbentuknya mekanisme diskusi internal, dan dokumen perencanaan) dan *outcome* (perubahan kondisi, seperti meningkatnya partisipasi, kemandirian kelembagaan, dan kualitas tata kelola ekowisata) memungkinkan evaluasi yang lebih objektif terhadap dampak pendampingan. Dengan demikian, LFA mendukung pengelolaan pendampingan yang adaptif, berbasis pembelajaran, dan terdokumentasi secara sistematis.

Lebih jauh, penggunaan LFA sejalan dengan pendekatan *Community-Based Research* (CBR) yang digunakan dalam penelitian ini. Keduanya menempatkan komunitas sebagai subjek utama perubahan, mendorong refleksi kolektif atas masalah yang dihadapi, serta mengarahkan proses pendampingan pada pencapaian tujuan bersama yang disepakati. Oleh karena itu, LFA tidak diposisikan sebagai alat kontrol eksternal, melainkan sebagai instrumen fasilitatif yang membantu Pokdarwis memahami posisi mereka saat ini, merumuskan arah pengembangan ekowisata, dan membangun kapasitas kelembagaan secara berkelanjutan.

1.6 Literatur Review

Kajian ini meninjau beberapa penelitian yang relevan dengan variabel Penguatan Kapasitas, Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), dan Ekowisata. Tinjauan ini bertujuan untuk memetakan posisi penelitian saat ini dan mengidentifikasi celah (*gap*) yang akan diisi. Berikut adalah literatur review yang dikaji dalam penelitian ini:

1. Gavrila et al. (2024) dalam risetnya yang berjudul “Penguatan Peran Pokdarwis dalam Pemberdayaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan” memfokuskan pada penguatan peran kelembagaan Pokdarwis dalam memberdayakan masyarakat. Temuannya menunjukkan bahwa Pokdarwis memiliki peran vital, namun penelitian

ini merekomendasikan perlunya penguatan kelembagaan agar peran tersebut dapat berjalan secara efektif.

2. Azkar et al. (2022) melalui penelitian berjudul “Peningkatan Kapasitas SDM dan Kelembagaan Pokdarwis Kerujuk Lestari” berfokus pada pelatihan pemuda lokal untuk pemberdayaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan struktur kelembagaan Pokdarwis. Temuannya menunjukkan bahwa program pelatihan berhasil mendorong pembentukan organisasi yang lebih terstruktur, meningkatkan minat pengunjung, dan partisipasi masyarakat secara umum.
3. Karim et al. (2017) dalam riset berjudul “Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Mendukung Kepariwisata: Studi terhadap 7 Pokdarwis di Balikpapan” mengukur tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan tujuh Pokdarwis. Temuannya mengungkapkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat rata-rata berada pada level sedang (tokenisme), mengindikasikan adanya keterbatasan kewenangan dan kontrol komunitas dalam proses pengambilan keputusan strategis.
4. Pada et al. (2023) dalam Workshop Penguatan Kelompok Sadar Wisata dalam Pengembangan Wisata Edukasi Mangrove Demang Gedi berfokus pada program pelatihan untuk peningkatan kapasitas Pokdarwis. Temuan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman yang signifikan setelah pelatihan, menyimpulkan bahwa pelatihan terarah mampu memperkuat kompetensi pengelolaan wisata, disertai rekomendasi kolaborasi stakeholder.
5. Gavrila et al. (2024) melalui studi berjudul “Peran Pelatihan dan Kolaborasi terhadap Kompetensi Pokdarwis di Desa Batu Kumbang, Lombok Barat” mengkaji pengaruh pelatihan berbasis potensi lokal dan kemitraan dalam meningkatkan kompetensi teknis Pokdarwis. Temuan mengonfirmasi bahwa pelatihan yang berfokus pada pengolahan potensi lokal berhasil meningkatkan kapabilitas pengelolaan kawasan secara nyata.

6. Nugroho et al. (2023) dalam studinya “Peningkatan Potensi Wisata Umbulan Desa Jajar melalui Pendampingan Ekowisata Berbasis Industri Kreatif” memfokuskan pada partisipasi masyarakat dalam ekowisata berbasis industri kreatif. Temuannya mengungkapkan bahwa pemanfaatan peluang digital dan industri kreatif mendorong inisiatif masyarakat dan merekomendasikan penguatan digital marketing dan inovasi lokal.
7. Wijayanti dkk. (2023) melalui penelitian “Pelatihan Manajemen Digital dan Ticketing untuk Pokdarwis Sungai Maron” menunjukkan bahwa pelatihan yang berfokus pada pengelolaan media sosial, ticketing digital, serta kemampuan foto dan videografi berdampak positif signifikan terhadap pemahaman prinsip ekowisata berkelanjutan dan profesionalisme pelayanan wisata.
8. Wahyuni (2021) melalui studi “Efektivitas Kelembagaan Pokdarwis dalam Pengelolaan Ekowisata di Sleman” menemukan bahwa banyak Pokdarwis hanya aktif selama adanya intervensi program eksternal dan tidak memiliki visi jangka panjang. Temuannya menggarisbawahi bahwa struktur kelembagaan yang cenderung non-otomatis dan seremonial menghambat jaminan keberlanjutan pengelolaan wisata.

Berdasarkan kajian literatur yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa mayoritas penelitian terdahulu fokus pada intervensi eksternal dan teknis, seperti pentingnya pelatihan (*hard skill* dan *soft skill*), pembentukan struktur kelembagaan, serta kolaborasi antara masyarakat dan stakeholder eksternal dalam mendorong keberhasilan ekowisata berbasis komunitas (Gavrila et al., 2024; Azkar et al., 2022; Nugroho et al., 2023). Penelitian-penelitian ini berhasil menyoroti keberhasilan intervensi teknis, namun juga menemukan kelemahan pada aspek keberlanjutan dan kontrol komunitas yang masih bersifat tokenisme (Karim et al., 2017; Wahyuni, 2021).

Berdasarkan penelusuran literatur di atas, dapat disimpulkan bahwa kajian mengenai Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) dan penguatan kapasitas dalam pengembangan ekowisata telah berkembang cukup luas, baik

dari aspek kelembagaan, sumber daya manusia, partisipasi masyarakat, maupun inovasi pengelolaan wisata berbasis digital dan industri kreatif. Secara umum, mayoritas penelitian sepakat bahwa Pokdarwis memegang peran strategis sebagai aktor lokal dalam mendorong pariwisata berkelanjutan, namun efektivitas peran tersebut sangat bergantung pada kapasitas kelembagaan dan kualitas partisipasi komunitas.

Sejumlah studi menekankan pentingnya penguatan kelembagaan Pokdarwis melalui pelatihan dan pendampingan. Gavril et al. (2024) serta Azkar et al. (2022) menunjukkan bahwa intervensi berupa pelatihan dan pembenahan struktur organisasi mampu meningkatkan fungsi kelembagaan Pokdarwis dan partisipasi masyarakat. Temuan ini mengonfirmasi bahwa peningkatan kapasitas teknis dan organisatoris merupakan prasyarat dasar bagi pengelolaan pariwisata berbasis komunitas. Namun demikian, penelitian-penelitian tersebut cenderung memosisikan pelatihan sebagai instrumen utama, tanpa mengkaji secara mendalam proses transformasi kelembagaan jangka panjang dan dinamika internal komunitas pasca-intervensi.

Di sisi lain, kajian mengenai partisipasi masyarakat mengungkapkan adanya persoalan struktural yang lebih mendasar. Karim et al. (2017) menemukan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Pokdarwis masih berada pada level tokenisme, yang menandakan keterbatasan kontrol dan kewenangan komunitas dalam pengambilan keputusan strategis. Temuan ini diperkuat oleh Wahyuni (2021), yang menunjukkan bahwa banyak Pokdarwis bersifat reaktif dan hanya aktif selama adanya dukungan eksternal, sehingga keberlanjutan kelembagaan menjadi rapuh. Literatur ini mengindikasikan bahwa masalah Pokdarwis tidak semata terletak pada kurangnya keterampilan, tetapi pada lemahnya visi kolektif, kepemimpinan sosial, dan mekanisme internal yang mendorong kemandirian.

Penelitian-penelitian yang lebih mutakhir mulai menyoroti pentingnya inovasi dan kolaborasi lintas sektor. Pada et al. (2023), Nugroho et al. (2023),

serta Wijayanti dkk. (2023) menunjukkan bahwa pendekatan pelatihan tematik seperti wisata edukasi, industri kreatif, dan manajemen digital mampu meningkatkan kompetensi teknis dan profesionalisme Pokdarwis. Meskipun demikian, fokus kajian ini masih dominan pada peningkatan output jangka pendek (pengetahuan, keterampilan, dan peningkatan kunjungan), sementara dimensi integrasi pengetahuan dengan partisipasi dalam perencanaan strategis berbasis komunitas belum dikaji secara mendalam.

Berdasarkan keseluruhan literatur tersebut, terdapat celah penelitian (research gap) yang cukup jelas. Pertama, sebagian besar studi masih berorientasi pada pendekatan pelatihan dan pendampingan yang bersifat sektoral dan teknis, serta belum menempatkan penguatan kapasitas sebagai proses transformasi kelembagaan dan sosial yang berkelanjutan. Kedua, kajian yang secara eksplisit mengintegrasikan partisipasi aktif komunitas, peningkatan literasi ekowisata, dan perencanaan strategis berbasis kapasitas lokal dalam satu kerangka analisis yang utuh masih terbatas. Ketiga, penelitian yang mengaitkan penguatan kapasitas Pokdarwis dengan konteks sosial-budaya dan nilai religius lokal, khususnya dalam konteks nagari Minangkabau, hampir belum ditemukan.

Oleh karena itu, penelitian ini memposisikan diri untuk mengisi kekosongan tersebut dengan mengkaji penguatan kapasitas Pokdarwis sebagai proses transformatif yang melibatkan dimensi kelembagaan, kognitif, dan partisipatif secara simultan. Berbeda dari penelitian sebelumnya, studi ini menggunakan pendekatan *Community-Based Research* (CBR) yang dipadukan dengan *Logical Framework Approach* (LFA) untuk merancang strategi pendampingan yang tidak hanya berfokus pada peningkatan keterampilan, tetapi juga pada pembentukan visi kolektif, integrasi pengetahuan dan partisipasi dalam perencanaan, serta penguatan tata kelola ekowisata yang berkelanjutan dan kontekstual.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan tidak hanya memperkaya diskursus akademik mengenai penguatan kapasitas Pokdarwis dan ekowisata berbasis komunitas, tetapi juga memberikan model pendampingan yang

relevan dan aplikatif bagi pengembangan ekowisata di tingkat nagari, khususnya di Nagari Batu Bajanjang.

